



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/50/KEP/413.013/2020**

TENTANG

**PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menunjuk Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Menunjuk Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

: Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berwenang dan bertanggungjawab :

- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. menyiapkan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KETIGA : Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berwenang dan bertanggungjawab :

- a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;

- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. menyiapkan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penetausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan

- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KEEMPAT : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud diktum KESATU, secara administratif bertanggungjawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Pengurus Barang Pengguna dan
Pengurus Barang Pembantu
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LOKON NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/50/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

NAMA-NAMA PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
KATEGORI TINGGI :		
1	MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT, A.Md.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
2	ATIK PRAMULIYANITA UMIYATI, S.E., M.M. NIP. 19740722 200901 2 002	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
3	ISNANIK, S.E. NIP. 19630228 198503 2 007	DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN
4	SUPARDI NIP. 19690115 200701 1 016	DINAS PU. BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN
5	SUJUD PURNOMO, S.E. NIP. 19760809 200901 1 003	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN
6	WAHIB ASHARI, S.Kom. NIP. 19820414 201 001 1 016	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN
7	RATNA PALUPI UJIANTI, S.Psi. NIP. 19820613 201001 2 020	RSUD Dr. SOEGIRI KABUPATEN LAMONGAN
8	SUDARYATMO, A.Md. NIP. 198603626 201001 1 006	RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
9	SRI DEWI KUSUMAWATI NIP. 19811115 201001 2 001	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
KATEGORI SEDANG:		
1	IMAM ASKURI	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN
2	YANO EKA PRASETYA, S.T. NIP. 19830111 201101 1 007	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMONGAN
3	ADITYA PUTRA PRATAMA MUKTI	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
4	BAMBANG SUYANTO NIP. 19710704 200701 1 016	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMONGAN
5	DEVI RISMAWATI, S.Pi.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN
6	M. REZA AZHAR B.	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
7	ARI WAHYUDI, A.Md.	INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN
8	SANDY KISWOYO	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
9	NIKI PERWIRA SARI, A.Md. NIP. 19860225 201001 2 013	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN
10	MOCH. AINUR ROFIQ SUVI NIP. 19790313 200901 1 004	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN

1	2	3
11	SITI AMINATUZ Z, S.Pd.	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN
12	SUMINEM, S.E. NIP. 19771116 200112 2 004	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
13	HARTATIK, S.Kom. NIP. 19860509 201001 2 013	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
14	FAROH KUMALA DEWI	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
15	SEPTARINA HANDAYANI, S.Kel. NIP. 19800906 201001 2 011	DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN
16	ELYAH CHUSNIYAH, S.Sos.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMONGAN
17	RINA APRILIA, S.Pd.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
18	ABDUR ROKHIM, S.E.	DINAS KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
19	ALVI LAILIYAH, S.E.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGAN
20	MOH RISQI AINUN NAIM	DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN
21	SUSILOWATI, A.Md. NIP. 19820402 201001 2 015	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN
22	HENDRA RANTUNG, S.H. NIP. 19751021 200701 1 005	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
23	AGRA ARI NUGRAHA, S.H.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN
24	MUHAMMAD ALIFUDDIN AGUSPRIYANTO	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMONGAN
25	IMAM KHUSAERI, S.E.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN
26	ADITA WAHYU SETYO N	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN
27	DIAN WAHYU KURNIAWAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN
28	RUSLAN NIP. 19670805 201212 2 004	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMONGAN
29	ANDI KRISTI NOFEBRIANTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
KATEGORI RENDAH:		
1	AGAM BAGUS SYAILENDRA, S.E.	KECAMATAN SUKODADI
2	IMAM SANTOSO, S.E. NIP. 19690405 200701 1 029	KECAMATAN MANTUP
3	RINO ALDI NUR PRATAMA	KECAMATAN PUCUK
4	SITI AISYAH, S.E.	KECAMATAN KARANGBINANGUN
5	MOCH. KUNTHO DWI FEBRI HADIONO	KECAMATAN TURI

1	2	3
6	LIK AYAH NIP. 19720810 200801 2 023	KECAMATAN PACIRAN
7	NUR SIDIQ NIP. 19731216 200906 1 001	KECAMATAN MODO
8	YUSUF SUWANDA	KECAMATAN SOLOKURO
9	SUDARNARSO NIP. 19690807 200312 1 004	KECAMATAN SARIREJO
10	NUR HANISAH, S.E.	KECAMATAN KEDUNGPRING
11	MOH. KHUSNAN HABIB, S.Kom.	KECAMATAN TIKUNG
12	ABDUL BASITH AZHAM, S.Kom.	KECAMATAN BLULUK
13	DIKI ANANTA KRAMAYUDHA	KECAMATAN NGIMBANG
14	RUTI'AH	KECAMATAN SUKORAME
15	WAWAN SULISTIONO, S.Kom.	KECAMATAN KEMBANGBAHU
16	MAS'UDI NIP. 19720304 200901 1 003	KECAMATAN BRONDONG
17	VIRDA FIRNANDA ANGGRAINI	KECAMATAN KARANGGENENG
18	HAFIDH SAADILLAH	KECAMATAN LAMONGAN
19	SRI KISWATIN NIP. 19630602 198602 2 001	KECAMATAN DEKET
20	AYU RETNO EKOWATI, S.Pd.	KECAMATAN SEKARAN
21	ISTIROKHAH, S.E. NIP. 19770714 200801 2 002	KECAMATAN MADURAN
22	ANGGARA PURWO JATMIKO	KECAMATAN SAMBENG
23	IING ERLINE THOYYBAH	KECAMATAN SUGIO
24	M. YUSUF DOKHELAN, S.Kom.	KECAMATAN KALITENGAH
25	TITIK NUR ANGGRAINI, S.E.	KECAMATAN GLAGAH
26	ZAINUL ABIDIN, S.KOM	KECAMATAN BABAT
27	MAFTUKHAN	KECAMATAN LAREN



BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/50/KEP/413.013/2020
 TANGGAL : 2 JANUARI 2020

NAMA-NAMA PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	NIP	KETERANGAN
1	2	3	4
I	DINAS PENDIDIKAN :		
1	ERNI, S.E.		KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN LAMONGAN
2	SITI ZUBAIDAH		KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN DEKET
3	MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN	19780503 201001 1 003	KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TIKUNG
4	SUWANTO	19790409 201406 1 001	KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SARIREJO
5	MUHAMMAD YUSUF, SPd	19850511 201001 1 002	KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TURI
6	ABDUL ROCHMAN	19660312 200701 1 033	KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KEMBANGBAHU
7	WAHYU EKO PRASETYO, S.Pd.SD.		KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SUKODADI
8	TSALIS, S.E.		KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PUCUK
9	SIRAM	19640503 200010 1 002	KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SEKARAN
10	ANI RATNA SARI		KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN MADURAN
11	SUKIRMAN, A. Ma.	19820215 201001 2 001	KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGGENENG
12	SUWITO, S.Pd.	19630416 200010 1 002	KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BABAT
13	NANANG YULIANTO	19810609 201406 1 003	KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KEDUNGPRING
14	DWI TUGAS LANGEN N, S.E.		KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN MODO
15	SUBANDI, S.Pd.	19680703 200701 1 023	KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SUGIO
16	SISWANTO, S.Pd.		KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN NGIMBANG
17	DIAN TRI SUJARWO		KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BLULUK
18	HERU SULISTYAWAN, S.Pd.	19850615 200801 1 004	KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SAMBENG
19	PRAYITNO	19640910 198603 1 006	KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN MANTUP
20	DIAN PRASETYO UTOMO		KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SUKORAME
21	APRILIA WIDYA ASTUTI		KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGBINANGUN
22	ANITA OKTAVIA, S.Pd.		KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GLAGAH
23	KASRUP, S.Pd.	19720601 200001 1 001	KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KALITENGAH
24	NANANG FAHRONI, S.E.	19820115 201001 1 001	KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PACIRAN
25	SUPARTO, S.Pd.	19630216 198201 1 001	KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BRONDONG
26	SUHARDI KARYA PURNAMA, S.Pd.		KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN LAREN
27	DJUNO	19620612 198904 1 001	KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SOLOKURO
28	NURDWI RAHMAWATI	19820310 201001 2 003	SMPN 1 LAMONGAN
29	RIZKY YAHYA YUSUF, S.Kom.		SMPN 2 LAMONGAN
30	KASIM		SMPN 3 LAMONGAN
31	MOCHAMAD THOHA FATWA		SMPN 4 LAMONGAN
32	ESAN	19630301 199802 1 001	SMPN 5 LAMONGAN

1	2	3	4
33	SODIG, S.Pd.		SMPN 1 DEKET
34	ASTAMAN AFANDI		SMPN 2 DEKET
35	SUPRAYITNO		SMPN 1 TURI
36	KHOIRUL MEI DWI SULISTİYONO		SMPN 1 TIKUNG
37	M. MAKIN MASRUFİ		SMPN 1 SARİREJO
38	MILA GALODHA FATMAWATI		SMPN 1 KEMBANGBAHU
39	SUGENG PRAMONO	19800201 201406 1 003	SMPN 1 KARANGBINANGUN
40	ANIK TRI LESTARI		SMPN 2 KARANGBINANGUN
41	KHANIYAH, S.E.	19830210 200901 2 009	SMPN 1 GLAGAH
42	SELVI ISMAWATI	19820521 201406 2 003	SMPN 1 KALITENGAH
43	YANIS EKA ESTINING TYAS		SMPN 1 SUKODADI
44	IS PURWATI	19840312 201001 2 002	SMPN 2 SUKODADI
45	BAMBANG MASUDI	19781110 200701 1 012	SMPN 1 KARANG GENENG
46	JUMARIYANTI, S.E., M.M.	19800921 201001 2 001	SMPN 1 MADURAN
47	WIWIK ASMA DEWI, S.Pd.		SMPN 1 SEKARAN
48	DIAN WAHYUNINGSIH, S.E.		SMPN 2 SEKARAN
49	NUR FADLILAH, S.H.		SMPN 1 BABAT
50	SYAIFUL ARIF	19780604 200801 1 015	SMPN 2 BABAT
51	KHARIROH NINGSIH	19670908 198803 2 010	SMPN 3 BABAT
52	HERMIN PRIHATIN		SMPN 4 BABAT
53	NURHADI, S.Pd.		SMPN 1 KEDUNGPRING
54	IRMA SURYANI	19821021 200901 2 004	SMPN 2 KEDUNGPRING
55	SULIADI		SMPN 1 SUGIO
56	DWI AGUS INDARTI	19830819 201406 2 003	SMPN 2 SUGIO
57	EDY MOHAMAD TURHAN		SMPN 3 SUGIO
58	AGUS BUDIONO	19730801 200701 1 015	SMPN 1 MODO
59	EKO BUDI RAHAYU MULYANINGSIH	19771022 201406 2 005	SMPN 2 MODO
60	EKYK DWI SETIAWAN		SMPN 1 NGIMBANG
61	SUPRIONO		SMPN 2 NGIMBANG
62	PILIPUS MARDI UTOMO		SMPN 3 NGIMBANG
63	GUNANIK		SMPN 1 BLULUK
64	IKA NORA WAHYU WIDIASTUTI, S.E.		SMPN 1 SAMBENG
65	M. YUSUF EFENDI		SMPN 1 MANTUP
66	SUMPOMO, S.Pd.		SMPN 2 MANTUP
67	AGUS HARIONO		SMPN 1 PACIRAN
68	KARNA	19750412 200701 1 013	SMPN 2 PACIRAN
69	SAKIMAN, S.E.		SMPN 1 BRONDONG
70	EDY SURYONO	19830816 200801 1 012	SMPN 1 LAREN

1	2	3	4
71	SALIM, S.Pd.	19711111 199802 1 002	SMPN 2 LAREN
72	ABDUL ROCHMAN		SMPN 1 SUKORAME
73	SUPIATUN	19640228 200701 2 008	SMPN 1 PUCUK
74	EKO WAHYU RAMADLANI, S.E.		SMPN 2 PUCUK
75	M. USMAN, S.Pd.	19740509 200804 1 008	SMPN 1 SOLOKURO
II DINAS KESEHATAN :			
1	ARDHIAS NURSANTI, S.Kep.Ns.	19810106 201101 2 005	PUSKESMAS BABAT
2	ERNI RETNO TRIMURNI, S.ST.	19720101 199302 2 002	PUSKESMAS BLULUK
3	SULIYONO, A.Md.Kep.	19800407 200604 1 021	PUSKESMAS BRONDONG
4	NURUL IKA SULISTYOWATI, Amd.Kep.	19830118 201406 2 003	PUSKESMAS DEKET
5	MUSTOFA, Amd.AK	19780827 201406 1 002	PUSKESMAS DERMOLEMAHBANG
6	AHMAD MUHADI	19740721 201406 1 002	PUSKESMAS DRADAH
7	WIDI ASTUTIK, S.E.	19770510 201212 2 007	PUSKESMAS GLAGAH
8	SUKAPRI, A.Md.Keb.	19800826 201905 2 002	PUSKESMAS KALITENGAH
9	HADI, S.E.	19650315 199102 1 004	PUSKESMAS KARANGBINANGUN
10	TUGIMIN, S.E.	19690615 199003 1 012	PUSKESMAS KARANGGENENG
11	IMAM BASUKI, S.E.	19640917 198711 1 002	PUSKESMAS KARANGKEMBANG
12	SUPARMAN, S.AP.	19640607 198703 1 008	PUSKESMAS KARANGPILANG
13	SUHARDI, S.E.	19651116 198801 1 001	PUSKESMAS KEDUNGPRING
14	AKHISTIN SA, A.Md. Keb.	19730809 200604 2 012	PUSKESMAS KEMBANGBAHU
15	SITI CHAFSHATOEN, A.Md., Kep.	19650913 199001 2 001	PUSKESMAS LAMONGAN
16	MOCHAMAD IRWAN, A.Md.Kep.	19691018 199403 1 008	PUSKESMAS LAREN
17	SUYIT	19720301 199003 1 002	PUSKESMAS MADURAN
18	FRIGATI NINGRUM, S.Kep.Ns.	19900204 201504 2 001	PUSKESMAS MANTUP
19	EKY DIRMA ARIFianto, S.E.	19800210 201406 1 002	PUSKESMAS MODO
20	KASENO, S.E.	19680916 199403 1 006	PUSKESMAS MOROPELANG
21	MARDIYONO	19650324 198603 1 014	PUSKESMAS NGIMBANG
22	EKO MULYONO, A.Md.Kep.	19800519 200312 1 003	PUSKESMAS PACIRAN
23	BAMBANG SUMANTRI, S.H.	19680323 198903 1 005	PUSKESMAS PAYAMAN
24	QOIRIYAH	19710506 199003 2 001	PUSKESMAS PUCUK
25	JARWO, S.E.	19710902 199102 1 001	PUSKESMAS SAMBENG
26	EKO ARIYANTONO, A.Md.KG.	19800801 201406 1 001	PUSKESMAS SEKARAN
27	SUGENG, S.E.	19681110 199003 1 016	PUSKESMAS SUGIO
28	ANHAR WIYATAMA, S.Kep.Ns.		PUSKESMAS SUKODADI
29	SUGIANTO, S.Kep.Ns.	19620320 198801 1 001	PUSKESMAS SUKORAME
30	HERIANTO, Amd.Kep.	19840026 201101 1 009	PUSKESMAS SUMBERAJI
31	LIM HANDAYANI, Amd.Kep.	19760829 201001 1 008	PUSKESMAS TIKUNG
32	ERIE SYABUDIN		PUSKESMAS TLOGOSADANG
33	EDY SASMITO	19770610 201406 1 002	PUSKESMAS TURI

1	2	3	4
34	EKA FITRIANA, S.KM.	19850625 200902 2 009	IFK DINKES
35	FAJAR P. PUTRA, S.Kom.		LABKESDA DINKES
III SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN:			
1	MACHFUDATUS SA'ADAH, S.E.		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2	ATI RUSMIATI		BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
3	WATIK SUPRPTI, S.H.	19810122 201101 2 003	BAGIAN HUKUM
4	DIAH IHDINI AMALIA, A.Md.	19760202 201101 2 006	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
5	ABDUL WAKHID, SE	19750317 200901 1 004	BAGIAN PEREKONOMIAN
6	RUDI SUYATNO, S.E.	19730506 200701 1 019	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
7	IKE PRAWESTY RAHAYU, S.Pd.		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
8	SITI MASRUOH		BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
9	ZULFAH, S.E.		BAGIAN ORGANISASI
10	ARYA SIGIT BIMANTORO		BAGIAN KERJA SAMA
11	HERU AGUS DARMAWAN	19740202 200801 1 011	BAGIAN UMUM
12	PARTONO, A.Md. KL.	19831023 201001 1 013	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

OKO NURSIYANTO
NIP. 19680114/198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI